

**PERAN ORGANIZATION FOR SECURITY IN EUROPE (OSCE) DALAM
MENANGANI KONFLIK
DI UKRAINA TIMUR**

Oleh : Andrew Mayson Sigalingging

(email : andrew307sigalingging@gmail.com)

Pembimbing : Dr. Umi O Retnaningsih, MA

Bibliografi : 12 Jurnal, 13 Buku, 2 Laporan, 2 Skripsi, 2 Majalah, 38 Website

Jurusan Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl, H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the role of the OSCE as an international organization that has the task of maintaining security and peace in the country of Ukraine which is experiencing a prolonged conflict, especially in the East Ukraine region. The conflict in Ukraine began after the fall of Ukrainian President Victor Yanucovych who was pro-Russian in 2014 which prompted Russia to illegally annex Crimea and was then followed by armed conflict between Pro-Russian separatists and Pro-Government parties. This conflict is getting bigger and longer because Russia provides support to the rebels and separatists. And this attracts the OSCE to play a role in resolving and reducing conflicts that occur.

This research is analyzed with the perspective of neorealism which believes that the state is the dominant actor but does not rule out the role of non-state actors. This research is also guided by the role theory and concept of Security. The method used is a qualitative method with a descriptive model. The technique of collecting data in this research is through literature study from several journals, books, documents and websites.

This study shows the results of the roles performed by the OSCE in dealing with the conflict in Ukraine. The participation of the OSCE's efforts are in the form of negotiations, holding conferences, forming a charter of agreements, sending special monitoring missions to monitor the dynamics of the conflict, supervising the presidential election as well as weapons and missions to assess human rights and minorities during the conflict. The forms of roles that the OSCE has carried out in Ukraine have worked well, although they cannot stop the conflict from continuing.

Keywords: *Ukraine, OSCE, Conflict, Crimea and Russia.*

PENDAHULUAN

OSCE merupakan salah satu wadah organisasi keamanan regional terbesar di dunia yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dan memfokuskan pada isu keamanan secara komprehensif, yang meliputi masalah pengawasaan senjata, langkah-langkah membangun kepercayaan dan keamanan, hak asasi manusia, kaum minoritas, demokratisasi, kebijakan strategi, antiterorisme, kegiatan ekonomi, dan lingkungan hidup serta sosial.

Setelah jatuhnya Presiden Viktor Yanukovich yang pro-Rusia pada tahun 2014, Rusia kemudian melakukan aneksasi terhadap wilayah Krimea secara ilegal. Penurunan paksa ini terjadi karena Pemerintah Ukraina yang dipimpin oleh Viktor Yanukovich memutuskan untuk tidak menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa, termasuk perjanjian Free Trade Area. Aneksasi ilegal terhadap Krimea itu akhirnya diikuti dengan pecahnya konflik bersenjata antara pihak separatis pro-Rusia dengan pihak pemerintah di wilayah Ukraina Timur. Konflik berlarut-larut karena Rusia melakukan intervensi dengan mendukung pihak pemberontak yang kemudian menyulut perang di daerah Ukraina Timur. Setelah jatuhnya Presiden Viktor Yanukovich, pemerintahan yang kosong kemudian membuat parlemen untuk mengadakan pemilu yang pada akhirnya memenangkan Petro Poroshenko sebagai presiden selanjutnya yang dianggap cukup nasionalis. Setelah menjabat, Presiden Petro Poroshenko menerapkan pelarangan penggunaan bahasa Rusia di wilayah

Ukraina. Hal ini menimbulkan keributan dan aksi di berbagai daerah oleh masyarakat yang merasa keberatan atas kebijakan yang dilakukan. Masalah ini kemudian berujung pada referendum untuk memerdekakan diri. Merespon konflik ini, OSCE kemudian melakukan beberapa aksi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Keterlibatan OSCE dalam konflik di wilayah Ukraina Timur bukan tanpa dasar karena Ukraina dan Rusia juga merupakan anggota dari organisasi tersebut. Beberapa usaha dan upaya sudah dilakukan OSCE di dalam konflik seperti membuat perjanjian damai oleh OSCE dan Jerman yang melibatkan berbagai pihak yang terkait yaitu Minsk Agreement 1 yang pada akhirnya gagal dan akhirnya di gantikan oleh Minsk Agreement 2. Dalam perjanjian ini keterlibatan OSCE dalam perang semakin besar di mana dalam perjanjian Minsk Agreement 2 OSCE dapat lebih jauh masuk ke dalam area konflik. Minsk Agreement 2 memutuskan OSCE agar dapat turun secara langsung ke dalam area konflik dan melakukan misi monitoring yang disebut special monitoring mission. Misi ini sama sekali tidak membawa kepentingan manapun di dalam konflik selain untuk dapat membantu menyelesaikan konflik. Dalam misi ini, wewenang dari OSCE adalah mencatat seberapa besar eskalasi perang yang ada serta mendata korban terdampak perang ini seperti mencatat peristiwa peristiwa penting di dalam kondisi kawasan timur terutama daerah Luhans'k dan Donets'k yang telah memproklamirkan diri menjadi Donetsk People Republic (DPR) dan Luhanks People Republic (LPR) dengan cara melaporkan

kondisi keamanan yang terjadi¹. Beberapa hal lain seperti dialog di lapangan secara langsung dengan pemangku kepentingan juga dilakukan oleh OSCE. Beberapa check point kemudian dibuat seperti di wilayah Luhansk untuk dapat memastikan misi ini dapat berjalan dengan baik. Hal tersebutlah yang mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh tentang peran yang telah dilakukan OSCE dalam menangani konflik di Ukraina Timur.

Pembahasan

Konflik di Ukraina Timur merupakan konflik yang berkepanjangan yang terjadi antara pihak pro pemerintah dan pihak pemberontak yang terbagi atas dua bagian yaitu Ukraina Barat yang lebih pro pemerintah dan Eropa sedangkan Ukraina yang mayoritasnya pro kepada Rusia karena banyak penduduk ras Rusia yang tinggal di Ukraina bagian Timur seperti di Krimea. Pro dan kontra terhadap kebijakan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menerima bantuan pinjaman dari Uni Eropa sebesar US\$ 827 miliar dengan syarat bersedia bergabung sebagai anggota Uni Eropa, atau menerima bantuan pinjaman dari Rusia sebesar US\$ 15 miliar dan diberikan penurunan harga gas bumi dari US\$ 400 menjadi US\$ 268 per seribu meter kubik. Kedua keputusan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang sangat mempengaruhi stabilitas di Ukraina. Setelah jatuhnya Presiden Ukraina Viktor Yanukovych yang di anggap

pro terhadap Rusia dan digantikan oleh Presiden Petro Poroshenko sebagai presiden selanjutnya yang dianggap cukup nasionalis. Petro Poroshenko sebagai presiden selanjutnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dinilai lebih pro terhadap Barat dan mengeluarkan kebijakan melarang pemakaian bahasa Rusia di Ukraina. Hal ini kemudian menimbulkan gejolak besar besaran di kawasan Ukraina Timur yang di tempati oleh masyarakat keturunan Rusia. Setelahnya terjadi pemberontakan yang juga di dukung oleh Rusia yang kemudian berujung pada aneksasi Krimea yang berbatasan langsung dengan Rusia. Hal ini kemudian menimbulkan kecaman dari Ukraina dan pihak-pihak lain seperti Uni Eropa dan NATO.

Faktor Penyebab Konflik di Ukraina Timur

Krisis Ukraina dimulai pada November 2013 ketika Ukraina mengalami masalah ekonomi berupa utang negara sebesar US\$ 140 miliar. Saat itu, Presiden Ukraina Viktor Yanukovych dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menerima bantuan pinjaman dari Uni Eropa sebesar US\$ 827 miliar dengan syarat bersedia bergabung sebagai anggota Uni Eropa, atau menerima bantuan pinjaman dari Rusia sebesar US\$ 15 miliar dan diberikan penurunan harga gas bumi dari US\$ 400 menjadi US\$ 268 per seribu meter kubik. Dalam keputusan antara dua opsi sebelumnya, perjanjian untuk bergabung dengan Uni Eropa ditanggguhkan sebanyak tiga kali, yaitu pada 21 November, 29 November, dan 15 Desember. Terakhir, pada 17 Desember, Yanukovych dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan

¹ OSCE. Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on information received as of 18:00 (Kyiv time), 2 October 2014.

pertemuan bersama di bantuan pinjaman yang sebelumnya telah ditawarkan Rusia, yang diikuti dengan penerimaan pinjaman secara resmi pada 24 Desember.

Pada bulan November 2013 Presiden Yanukovich memutuskan untuk menunda pembicaraan dengan Uni Eropa tentang Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA). Isu yang terkait dengan integrasi UE menjadi salah satu pembahasan yang penting di kawasan Eropa, terkhusus pada perjanjian AA. Integrasi dengan Uni Eropa sendiri menjadi poin penting yang dapat dilihat masyarakat Ukraina. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan diantara Uni Eropa dan Ukraina yaitu kerjasama ekonomi dalam Deep Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA). DCFTA merupakan bagian terpenting dari Association Agreement.² Penundaan pembicaraan dengan Uni Eropa telah membuat marah penduduk Ukraina. Mereka turun ke jalan untuk menuntut Presiden Yanukovich menandatangani kesepakatan dengan Uni Eropa. Kesepakatan dengan Uni Eropa tersebut dinilai dapat menciptakan hubungan yang lebih erat baik di bidang politik maupun untuk pertumbuhan ekonomi.³ Setelah penurunan Presiden Yanukovich yang dilakukan oleh Parlemen

² EU-Ukraine (Guide to the Association Agreement). European Commission, diakses melalui http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/images/top_stories/140912_eu-ukraine-associatinagreement-quick_guide.pdf pada tanggal 13 Juli 2021

³ Anonim. 2014. Krisis Politik Ukraina, Korban Terus Berjatuh, Beritakaltara.com diakses dari <http://beritakaltara.com/?p=3044> (diakses pada 13 juli 2021).

Ukraina karena dianggap telah gagal menjaga keamanan dan stabilitas di Ukraina. Pada waktu selanjutnya parlemen Ukraina mengangkat Petro Poroshenko sebagai presiden selanjutnya yang dianggap cukup nasionalis. Setelah menjabat, Presiden Petro Poroshenko menerapkan pelarangan penggunaan bahasa Rusia di wilayah Ukraina. Hal ini menimbulkan keributan dan aksi di berbagai daerah oleh masyarakat yang merasa keberatan atas kebijakan yang dilakukan.

Upaya Penyelesaian Konflik di Ukraina Timur

Konflik di Ukraina yang berkepanjangan telah menjadi pusat perhatian terutama kawasan Eropa serta kawasan di sekitarnya. Hal ini tentunya mempengaruhi stabilitas global melihat negara yang terlibat di dalam konflik ini merupakan satu negara adidaya yaitu Rusia yang mendukung pemberontak di Ukraina Timur dan menganeksasi Krimea, serta banyak organisasi lainnya. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran akan konflik yang kian meluas dan membesar mengingat konflik telah terjadi dari tahun 2013 sampai tahun 2020. Hal ini memunculkan banyak ide dan gagasan untuk mengakhiri perang yang terjadi seperti upaya gencatan senjata, negosiasi dan upaya diplomasi. Namun upaya-upaya tersebut pada akhirnya sulit mengentikan konflik berkepanjangan seperti kesepakatan pertama yang telah ditetapkan di Jenewa, namun kemudian terjadi pertumpahan darah dan kontak senjata massal di Donbass, pertempuran sengit dan luas antar pendukung dan penentang pemerintah, pengambilalihan paksa kota-

kota dan penembakan jatuh pesawat MH17 yang pada akhirnya menyebabkan konflik tetap berlanjut. Serta turun tangan organisasi-organisasi Internasional telah turut membantu dan bertindak dalam menyelesaikan masalah terkait dengan konflik di Ukraina Timur. Salah satu organisasi yang ikut turun untuk membantun menyelesaikan masalah ini adalah OSCE (Organization for Security and Co-Operation in Europe). Telah banyak peran yang di lakukan OSCE selama membantu menyelesaikan permasalahan di Ukraina Timur. Ada beberapa piagam yang telah dibuat untuk menangani konflik ini antara lain seperti Minsk 1 serta Minsk 2 yang pada dasarnya di buat untuk menangani konflik tersebut dan membuat OSCE bisa masuk lebih dalam kedalam wilayah konflik.

Cooperative Security dan Peran OSCE

Di dalam menjalankan perannya dalam misi utamanya, OSCE memiliki gagasan Cooperative Security (CS), yaitu bentuk kerjasama keamanan antar negara sebagai cara untuk meredakan ketegangan dalam konflik, membangun kepercayaan, meningkatkan prospek pembangunan ekonomi, dan menjaga stabilitas dengan mempromosikan dialog dan konsultasi untuk menciptakan keamanan.

Upaya OSCE juga dapat di lihat dalam tindakannya mengadakan pertemuan dengan Ukraina, Rusia serta negara-negara eropa lainnya sebagai benuk untuk mengatasi konflik yang telah berlangsung cukup lama dan dalam mengurangi ketegangan yang terjadi di Ukraina. Akhirnya Ukraina, Rusia, Amerika Serikat

serta Uni Eropa sepakat untuk mengadakan pertemuan pada tanggal 17 April 2014 di kota Genewa, dan pertemuan tingkat tinggi itu di hadiri oleh Wakil senior Uni Eropa dalam urusan Kebijakan Keamanan dan Luar Negeri Catherine Ashton, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry dan Penjabat Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Deshchystsya.

Pertemuan yang dilakukan sebagai tujuan guna mencari cara untuk menangani Krisis yang terjadi dan semakin besar di Ukraina. OSCE mengambil peran sebagai katalis guna melaksanakan dialog politik diantara negara ataupun pihak yang kian terlibat di dalam konflik yang sedang terjadi. Ada tiga poin penting yang terbentuk di dalam pertemuan antara Ukraina, Rusia, Amerika Serikat serta Uni Eropa yang disebut dengan Geneva Walks, yaitu:

1. Semua pihak yang terlibat harus menahan diri agar tidak melakukan tindak kekerasan dan perilaku intimidasi.
2. Semua kelompok bersenjata tidak sah harus dilucuti, dan semua gedung yang diduduki harus dikembalikan kepada pemiliknya.
3. Pengampunan akan diberikan kepada para yang menyerahkan diri dan senjatanya kecuali bagi mereka yang dinyatakan bersalah karena kejahatan berat.⁴

⁴ Marc Perrin de Brichambaut. OSCE & The Crisis in Ukraine. Dalam Japan Institute of International Affairs, Tokyo 21 Mei 2014. Hal. 3

Pada tahap selanjutnya dilakukan pertemuan selanjutnya dari Geneva Talks yaitu Deklarasi Jenewa pada tanggal 17 Mei 2014. Kerangka yang di bentuk dari deklarasi ini ialah persiapan aturan didalam pemilihan presiden pada 25 Mei mendatang.

Peran ODIHR Dalam Mengawasi Pemilihan Presiden dan Parlemen di Ukraina

Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) adalah lembaga utama untuk dimensi manusiawi keamanan OSCE: suatu konsep umum yang mencakup perlindungan HAM, pengembangan masyarakat yang demokratis, dengan penekanan pada pemilihan umum, pembangunan lembaga, dan tata kelola pemerintahan; penguatan rule of law; dan pemrosesan kehormatan yang tulus dan saling pemahaman antar perseorangan dan negara.⁵ Pada perkembangan yang selanjutnya dari peran OSCE dalam melakukan misinya di Ukraina adalah OSCE/ODIHR (Kantor Lembaga Demokrasi dan Hak Asasi Manusia) bertindak sebagai pengamat (observer) dalam pemilihan presiden dan parlemen di Ukraina. Dalam melaksanakan dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi, salah satunya adalah sistem pemilihan umum yang demokratis dan persamaan hak rakyat sebagai pemilih. Tim yang akan berangkat ke Ukraina dipimpin oleh Tana de Zulueta (Italia) dengan tim inti terdiri dari 18 ahli dari 12 negara anggota di Kiev, 100 pengamat jangka panjang yang

dikerahkan ke daerah, dan 900 pengamat jangka pendek (short-term observers). pengamat). istilah pengamat) yang didatangkan dari negara anggota lain.⁶ Pada tanggal 28 Februari 2014, menteri luar negeri Ukraina mengundang OSCE/ODIHR untuk meninjau pemilihan presiden yang akan diadakan pada tanggal 25 Mei. Dalam memenuhi mandat peninjauan pemilu ini, OSCE/ODIHR mengemban misi, yaitu Election Observation Mission (EOM). Sebelumnya, OSCE/ODIHR juga telah mengawasi pemilihan parlemen 2012 di Ukraina dan pemilihan presiden 2010. ODIHR bersama dengan Venice Commission of the Council of Europe juga telah meluncurkan beberapa bentuk kerjasama dalam penyusunan undang-undang pemilu. Pemilihan parlemen di Ukraina diselenggarakan oleh sistem komisi pemilihan 3 tingkat, yaitu Komisi Pemilihan Pusat (CEC), 213 Komisi Pemilihan Distrik (DEC), dan 29.977 Komisi Pemilihan Daerah (PEC). KPU adalah lembaga yang bertanggung jawab atas urusan administrasi dalam pemilu yang bertindak bebas, profesional, dan kolektif. Persoalannya, transparansi KPU yang menurun saat mereka bertemu untuk persiapan pemilu karena rapat dilakukan secara tertutup.⁷

⁵ Toiko Tönisson Kleppe, Pelatihan Gender bagi Aparat Sektor Keamanan (Jenewa: DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRAW, 2008), hlm. i.

⁶ OSCE/ODIHR. 2014. Observation of Early Presidential Election in Ukraine, 25 Mei 2014. Dapat dilihat dalam [Early Presidential Election in Ukraine, 25 May 2014 | OSCE](#) diakses 21 Juli 2021

⁷ OSCE/ODIHR. Ukraine: Early Parliamentary Elections 26 Oktober 2014 dalam OSCE/ODIHR EOM Final Report. hal. 9

Peran OSCE dalam Mengadakan Negosiasi

Konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, yaitu antara Pemerintahan baru Ukraina dan dengan federasi Rusia terjadi karena intervensi dan terjadinya tindakan aneksasi pihak Rusia atas wilayah semenanjung dengan alasan keamanan wilayah Rusia sendiri yang dianggap telah terancam.

Dalam perkembangan selanjutnya, upaya mencari solusi dilakukan oleh OSCE dengan mengadakan negosiasi untuk mencari kesepakatan antara Pemerintah baru Ukraina dan Federasi Rusia dengan menjadi mediator antara kedua pihak dalam upaya mencari jalan terbaik atas konflik yang terjadi dengan melakukan perbincangan antara dua pihak. Pertemuan yang diadakan antara perwakilan Federasi Rusia dan pemerintah Baru Ukraina untuk OSCE PA (*Parliamentary Assembly*) di kota Vienna untuk memenuhi undangan dari Presiden Ranko Krivokapic yang juga anggota dari OSCE PA. Pertemuan bilateral yang dilaksanakan antara kedua pihak yang juga mengikutsertakan OSCE PA yang lainnya. Yang dibahas dalam pertemuan ini adalah penilaian kedua negara tentang masalah masalah yang sedang terjadi antara kedua pihak dan kedua pihak juga setuju akan mengadakan pertemuan ketahap selanjutnya demi menciptakan stabilitas keamanan di Ukraina.⁸

⁸ OSCE PA. Russian and Ukrainian Delegation to OSCE PA Meet to Discuss Crisis. Diakses dari <http://www.oscepa.org/news-a-media/press-releases/1668-russian-and-ukrainia-delegations-to->

Pertemuan selanjutnya yang diadakan di Kota Baku Azerbaijan mempertemukan perwakilan Rusia dan Ukraina dalam pertemuan bilateral dan perwakilan dari OSCE PA. Pertemuan tersebut memperjumpakan kedua pihak untuk membicarakan dan membuka dialog terkait yang akan dilakukan dalam dua jalur. Jalur pertama ialah dengan tetap melanjutkan dialog bilateral antara kedua perwakilan antara Ukraina dan Rusia serta jalur kedua adalah menciptakan suatu kelompok hubungan parlementer internasional yang terdiri atas perwakilan Ukraina dan Rusia. diperkenalkan oleh perwakilan dari Federasi Rusia Sergey Naryshkin dan didalam amandemen resolusi Komisi OSCE PA untuk Urusan Politik dan Keamanan. Amandemen ini adalah tentang menciptakan kreasi, atas kinerja OSCE PA dari kelompok hubungan parlementer di Ukraina sebagai wujud usaha mengurangi ketegangan dan mendukung negara negara yang berkonflik dapat keluar dari krisis yang melanda.⁹ Pertemuan tiga arah ini kemudian disebut Trilateral Contact Group yang pada akhirnya ditandatangani pada 5 September tahun yang sama sebagai tanda keseriusan ketiga aktor tersebut dalam membantu penyelesaian krisis Ukraina. Protokol tersebut juga dihadiri dan ditandatangani oleh mantan presiden Ukraina, Leonid Kuchma, dan para

[osce-parliamentary-assembly-meet-to-discuss-crisis](http://www.oscepa.org/news-a-media/press-releases/1847-russian-and-ukrainian-osce-pa-delegations-pledge-to-pursue-two-track-dialogue) pada tanggal 21 Juli 2021

⁹ OSCE PA. Russian and Ukrainian OSCE PA Delegation Pledge to Pursue Two-Track Dialogue. Dapat dilihat dalam <http://www.oscepa.org/news-a-media/press-releases/1847-russian-and-ukrainian-osce-pa-delegations-pledge-to-pursue-two-track-dialogue> diakses 3 Februari 2015.

pemimpin separatis wilayah Donetsk dan Luhansk Zakharchenko dan I.V. Plotnitsky.

Misi Penilaian dan Penegakan Hak Asasi Manusia dan Minoritas

Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) adalah lembaga utama untuk dimensi manusiawi keamanan OSCE: suatu konsep umum yang mencakup perlindungan HAM, pengembangan masyarakat yang demokratis, dengan penekanan pada pemilihan umum, pembangunan lembaga, dan tata kelola pemerintahan; penguatan rule of law; dan pemrosesan kehormatan yang tulus dan saling pemahaman antar perseorangan dan negara.¹⁰ Setelah pecahnya konflik berkepanjangan di Ukraina yaitu setelah aneksasi Krimea oleh Rusia dan dilanjutkan dengan jatuhnya wilayah Donetsk dan Luhansk ke tangan gerakan separatis pro-Rusia, telah banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia terutama di wilayah Ukraina Timur.¹¹ Sebuah laporan PBB menyatakan kejahatan perang mungkin dilakukan oleh separatis di Ukraina Timur. Tapi militer Ukraina juga dianggap melakukan pelanggaran. Dalam laporan-laporan yang dikeluarkan PBB juga menyimpulkan bahwa mereka juga menemukan masalah serius terkait pelecehan dan penghukuman kelompok Tatar di Krimea, daerah yang sebagian besar penduduknya adalah suku

¹⁰ Kleppe, Op. Cit., i.

¹¹ Agung Sasongko, "Rusia: Barat Tak Niat Selesaikan Krisis Ukraina". Republika diakses dari <https://republika.co.id/berita/rusia-barat-tak-niat-selesaikan-krisis-ukraina>, diakses pada tanggal 21 Juli 2021.

Rusia yang dianeksasi pada bulan Maret.¹² Untuk menanggapi dan memenuhi permintaan pemerintah Ukraina, OSCE di tanggal 13 Maret terkait dengan Misi Penilaian Hak Asasi Manusia ke Ukraina, khususnya terkait situasi pelanggaran hak-hak asasi manusia kaum minoritas di sana, terutama kepada masyarakat Tatar di Krimea yang sering mendapat tindakan kekerasan OSCE melibatkan lembaganya yang terkait akan penyelesaian masalah tersebut, yaitu Komisi Tinggi Urusan Minoritas Nasional dari badan ODIHR. Komisi Tinggi OSCE untuk Urusan Minoritas Nasional (HCNM) adalah lembaga di dalam OSCE yang bekerja untuk mengidentifikasi dan mencari penyelesaian pertama dari ketegangan etnis yang dapat membahayakan perdamaian, stabilitas, atau hubungan persahabatan antara negara-negara anggota OSCE itu sendiri. Komisararis Tinggi sendiri sebenarnya adalah alat pencegahan konflik yang menggunakan pendekatan Cross Dimensional. Tugas utamanya adalah mengingatkan kewajiban masing-masing negara terhadap hak-hak minoritas di negaranya masing-masing karena seringkali terjadi pengabaian atau kegagalan proses penghormatan terhadap minoritas yang sebenarnya merupakan sumber ketegangan etnis yang sangat menentukan yang dapat berujung pada konflik.

Misi Pemantauan Khusus dan Kegiatan Verifikasi Militer oleh OSCE

¹² BBC News, PBB menduga pelanggaran HAM di Ukraina, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/05/14_0516_ukraina_ham pada tanggal 21 Juli 2021.

Misi Pemantauan Khusus OSCE ke Ukraina (SMM) dikerahkan pada 21 Maret 2014, menyusul permintaan ke OSCE oleh pemerintah Ukraina dan keputusan konsensus oleh 57 negara peserta OSCE. SMM adalah misi sipil yang tidak bersenjata, hadir di lapangan 24/7 di semua wilayah Ukraina. Tugas utamanya adalah mengamati dan melaporkan secara tidak memihak dan objektif tentang situasi di Ukraina; dan untuk memfasilitasi dialog di antara semua pihak yang terlibat dalam krisis.¹³ Misi pemantauan ini diprakarsai akibat dari dialog antara OSCE beserta pihak Ukraina dan Rusia dan mengambil keputusan dengan melakukan metode konsensus dalam pelaksanaan Misi Pemantauan Khusus ke daerah konflik di Ukraina. Kantor Pusat Misi Pemantauan Khusus OSCE berlokasi di kota Kiev. Para pemantau akhirnya dikirim ke kota-kota besar di Ukraina, seperti Kherson, Odessa, Lviv, Ivano-Frankivsk, Kharkiv, Donetsk, Dnepropetrovsk, Chernivtsi, dan Luhansk. Misi Pemantauan Khusus yang dilakukan dan beroperasi di bawah prinsip serta ketetapan-ketetapan keadilan serta transparansi yang tidak memihak. Misi Pemantauan Khusus memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi serta mengumpulkan laporan mengenai misi pengamanan di lapangan, melakukan perumusan fakta-fakta yang juga berkaitan dengan dengan kejadian-kejadian di lapangan dan misi yang paling utama adalah

¹³ OSCE, OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine, diakses dari [OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine | OSCE](#) pada tanggal 21 Juli 2021.

membantu Ukraina keluar dari konflik yang terus berlanjut serta memfasilitasi dialog antara kedua pihak yang berkonflik dalam rangka mendorong perdamaian, stabilitas, dan juga menjaga keamanan.

Misi Pengamatan OSCE di Pos-pos Pemeriksaan Rusia di Wilayah Gukovo dan Donetsk tersebut memiliki mandat untuk beroperasi di bawah prinsip serta ketetapan yang menyangkut nilai keadilan dan transparansi dalam memantau dan melaporkan situasi dan gerakan yang melintasi perbatasan Rusia di dua pos pemeriksaan di wilayah Gukovo dan Donetsk tersebut. Misi Pengamat OSCE ini juga memiliki beberapa tugas yang dilaksanakan di pos-pos pemeriksaan Rusia di wilayah Gukovo dan Donetsk.

Deklarasi Perjanjian Minsk I dan Minsk II

Perjanjian Minsk pertama ditandatangani di ibu kota Belarus pada 5 September 2014. Sesuai dengan rencana perdamaian Poroshenko sebelumnya, perjanjian itu menyerukan langkah-langkah berikut: OSCE- gencatan senjata yang dipantau; pertukaran tahanan; penarikan 'formasi bersenjata, peralatan militer dan pejuang dan tentara bayaran' dari Ukraina; pembentukan 'zona keamanan' yang dipantau OSCE di sepanjang perbatasan; dan program rekonstruksi ekonomi untuk Donbas.¹⁴

¹⁴ Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) (2014), 'Протокол о результатах консультаций Трехсторонней контактной группы, Минск, 5 сентября 2014 г.' [Protocol on the results of consultations of the Trilateral Contact Group, Minsk, 5 September 2014], 5 September 2014,

Ditandatangani pada 16 Oktober oleh Poroshenko, perjanjian itu akan berlaku selama tiga tahun dan akan diperpanjang setiap tahun setelah itu. Hal ini menjadwalkan pemilihan lokal pra-waktu di Donbas yang diduduki pada 7 Desember. Ini memberi DNR dan LNR hak untuk membentuk pasukan polisi mereka sendiri, untuk menunjuk hakim dan jaksa, dan untuk mengejar ‘penentuan nasib bahasa sendiri’. Undang-undang tersebut juga melarang otoritas pusat membubarkan dewan lokal (parlemen).¹⁵ Pengumuman gencatan senjata tidak banyak berpengaruh. Saat pertempuran berlanjut, Rusia mendukung rezim DNR/LNR untuk membuat mereka kebal terhadap tekanan baru dari Ukraina, dan dengan demikian menghindari terulangnya krisis musim panas.

Saat pertempuran berkecamuk di Debaltseve, negosiasi darurat ditengahi oleh Kanselir Angela Merkel dari Jerman dan Presiden François Hollande dari Prancis yang berlangsung di kota Minsk. Negosiasi ini menghasilkan keputusan tindakan untuk implementasi perjanjian Minsk 2. Dokumen yang ditandatangani pada 12 Februari 2015 oleh perwakilan dari OSCE, Rusia, Ukraina, DNR dan LNR, telah menjadi kerangka

diakses dari <https://www.osce.org/ru/home/123258> pada tanggal 22 Juli 2021

¹⁵ Website of the Verkhovna Rada of Ukraine (2014), ‘Zakon Ukrainy “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”’ [Law of Ukraine on the special regime of local self-government in certain regions of Donetsk and Luhansk oblasts], 16 September 2014, diakses dari <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1680-18/ed20140916> pada tanggal 22 Juli 2021.

kerja untuk upaya selanjutnya untuk mengakhiri perang.¹⁶ , Minsk-2 dapat dilihat dengan beberapa sisi yang sangat berbeda. Versi Ukraina menempatkan pembentukan kembali kontrol di timur sebelum penyelesaian politik. Rusia akan mengevakuasi pasukannya dan mengembalikan perbatasan ke Ukraina. Pemilihan akan diadakan sesuai dengan standar OSCE/ODIHR. Donbas akan diintegrasikan kembali sejalan dengan program desentralisasi nasional dengan beberapa kekuatan ekstra dan disubordinasikan lagi kepada pihak berwenang di Kyiv. Sehingga Ukraina akan dipulihkan sebagai negara berdaulat. Minsk-2 versi Rusia membalikkan elemen kunci dari pengurutan ini dimana penyelesaian politik final akan terjadi sebelum Ukraina merebut kembali kendali atas Donbas serta pemilihan akan diadakan di DNR dan LNR dan Kyiv akan menyetujui devolusi kekuasaan yang komprehensif kepada rezim-rezim ini. Ini akan memperkuat negara-negara bagian yang dikendalikan Rusia, menghancurkan bagian belakang negara Ukraina, mencegah otoritas pusat menjalankan negara itu sebagai unit terintegrasi dan menghancurkan integrasi ke arah barat. Hanya dengan begitu Ukraina akan mendapatkan kembali kendali atas perbatasan, untuk menjawab pertanyaan apakah Rusia akan mengizinkannya hal itu masih diperdebatkan. Singkatnya, Minsk-2

¹⁶ OSCE (2015), ‘Комплекс мер по выполнению Минских соглашений’ [Package of measures for the implementation of the Minsk agreements], diakses dari <https://www.osce.org/ru/cio/140221> pada tanggal 22 juli 2021

mendukung pandangan kedaulatan yang saling eksklusif.

Daftar Pustaka

Agung Sasongko, “Rusia: Barat Tak Niat Selesaikan Krisis Ukraina”.
Republika
<https://republika.co.id/berita/rusia-barat-tak-niat-selesaikan-krisis-ukraina>. (Diakses pada 21 Juli 2021).

Anonim. “Krisis Politik Ukraina, Korban Terus Berjatuhan”.
Beritakaltara.com.
<http://beritakaltara.com/?p=3044>.
(diakses pada 13 juli 2021).

BBC News. “PBB menduga pelanggaran HAM di Ukraina”.
https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/05/140516_ukraina_ham
(Diakses pada 21 Juli 2021).

Brichambau, Marc Perrin de. 2014. *OSCE & The Crisis in Ukraine*. Tokyo: Japan Institute of International Affairs.

EU-Ukraine (Guide to the Association Agreement). “European Commission”.
http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/images/top_stories/140912_eu-ukraine-association-agreement-quick-guide.pdf. (Diakses pada 13 Juli 2021).

John J. Mearsheimer. 2014. “Why the Ukraine Crisis is the West’s Fault: *The Liberal Delusions that*

Provoked Putin”, Council on Foreign Relations, Vol. 93, No.5, hal 56-59.

Kleppe, Toiko Tõnisson. 2008. *Pelatihan Gender bagi Aparat Sektor Keamanan*. Jenewa: DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRAW.

OSCE PA. “Russian and Ukrainian Delegation to OSCE PA Meet to Discuss Crisis”.
<http://www.oscepa.org/news-media/press-releases/1668-russian-and-ukrainia-delegations-to-osce-parliamentary-assembly-meet-to-discuss-crisis>. (Diakses pada tanggal 21 Juli 2021)

OSCE PA. “Russian and Ukrainian OSCE PA Delegation Pledge to Pursue Two-Track Dialogue”.
<http://www.oscepa.org/news-media/press-releases/1847-russian-and-ukrainian-osce-pa-delegations-pledge-to-pursue-two-track-dialogue>. (Diakses pada 3 Februari 2015).

OSCE, OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine, [OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine | OSCE](http://www.osce.org/ukraine) (Diakses pada 21 Juli 2021).

OSCE. “Протокол о результатах консультаций Трехсторонней контактной группы, Минск, 5 сентября 2014 г.’ [Protocol on the results of consultations of the Trilateral Contact Group, Minsk, 5 September 2014], 5 September 2014,
<https://www.osce.org/ru/home/123258>. (Diakses pada 22 Juli 2021).

OSCE. Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on information received as of 18:00 (Kyiv time), 2 October 2014

OSCE/ODIHR. “Observation of Early Presidential Election in Ukraine”. [Early Presidential Election in Ukraine, 25 May 2014 | OSCE.](#) (Diakses pada 21 Juli 2021).

Website of the Verkhovna Rada of Ukraine “Zakon Ukrainy “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей” [Law of Ukraine on the special regime of local self-government in certain regions of Donetsk and Luhansk oblasts], 16 September 2014, <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1680-18/ed20140916>. (Diakses pada tanggal 22 Juli 2021).

OSCE. “Комплекс мер по выполнению Минских соглашений” [Package of measures for the implementation of the Minsk agreements], <https://www.osce.org/ru/cio/140221> (Diakses pada 22 juli 2021).

OSCE/ODIHR. Ukraine: Early Parliamentary Elections 26 Oktober 2014 dalam OSCE/ODIHR EOM Final Report. hal. 9